



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Maksud Dan Tujuan	I – 1
1.3 Landasan Hukum	I – 2
1.4 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I – 5
1.5 Sistematika Penulisan	I – 5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
2.1 Posisi Geografis dan Administrasi	II – 1
2.2 Kondisi Fisik Dasar	II – 2
2.2.1 Tata Guna Tanah / Lahan	II – 2
2.2.2 Topografi	II – 3
2.2.3 Iklim	II – 4
2.2.4 Hidrologi	II – 5
2.2.5 Karakteristik dan Potensi Fisik Wilayah	II – 6
2.3 Kondisi Sosial Daerah	II – 7
2.3.1 Jumlah Penduduk	II – 7
2.3.2 Agama	II – 9
2.3.3 Pendidikan	II – 11
2.3.4 Kesehatan	II – 16
2.3.5 Kondisi Keamanan dan Ketertiban	II – 22
2.3.6 Pengarusutamaan Gender	II – 23
2.3.7 Penanggulangan Kemiskinan	II – 23
2.4 Kondisi Perekonomian Daerah	II – 24
2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi	II – 24
2.4.2 Pendapatan Perkapita	II – 26
2.4.3 Tingkat Pengangguran	II – 27
2.4.4 Pertanian, Peternakan dan Perikanan	II – 27
2.4.5 Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	II – 33



2.4.6	Penanaman Modal	II – 36
2.4.7	Kehutanan dan Perkebunan	II – 37
2.5	Lingkungan Hidup	II – 40
2.6	Kebudayaan dan Pariwisata	II – 40
2.7	Kondisi Prasarana Wilayah	II – 42
2.7.1	Jalan	II – 42
2.7.2	Pengairan	II – 43
2.7.3	Perhubungan	II – 44
 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA		
	KERANGKA PENDANAAN	III – 1
3.1	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah	III – 1
3.1.1	Perkembangan Pendapatan	III – 3
3.1.2	Perkembangan Belanja	III – 4
3.1.3	Perkembangan Pembiayaan	III – 6
3.2	Kerangka Pendanaan	III – 7
 BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS		
		IV – 1
4.1	Kesalehan Sosial Masyarakat yang Cenderung Menurun	IV – 2
4.2	Kesejahteraan Masyarakat yang Belum Merata	IV – 3
4.3	Akses terhadap Pelayanan Pendidikan Belum Merata	IV – 4
4.4	Pelayanan Kesehatan Belum Optimal dalam Mewujudkan Pola Hidup Sehat di Masyarakat	IV – 5
4.5	Potensi Terjadinya Gangguan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat	IV – 6
4.6	Pembangunan Pertanian Belum Memberikan Nilai Tambah yang Optimal Kepada Pelaku	IV – 7
4.7	Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pengembangan Produk Unggulan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Daerah	IV – 8
4.8	Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IV – 9
 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		
		V – 1
5.1	Visi	V – 1
5.2	Misi	V – 2
5.3	Tujuan	V – 3
5.4	Sasaran	V – 11



BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI – 1
6.1	Strategi	VI – 1
6.2	Arah Kebijakan	VI – 2
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII -1
7.1	Kebijakan Umum	VII – 1
7.2	Program Pembangunan Daerah	VII – 2
7.2.1	Program SKPD	VII – 3
7.2.2	Program Lintas SKPD	VII – 3
7.2.3	Program Kewilayahan	VII – 14
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI	
	KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII – 1
8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas	VIII – 1
8.2	Kebutuhan Pendanaan	VIII – 2
8.2.1	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama yang Dianut Masyarakat	VIII – 3
8.2.2	Peningkatan Kesempatan Masyarakat untuk Memperoleh Pekerjaan	VIII – 3
8.2.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kemerataan Memperoleh Pelayanan Kesehatan, Pangan dan Perumahan Layak Huni	VIII – 4
8.2.4	Peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal	VIII – 4
8.2.5	Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat untuk Menerapkan Pola Hidup sehat	VIII – 5
8.2.6	Peningkatan Suasana Aman, Tertip dan Damai di Masyarakat	VIII – 5
8.2.7	Peningkatan Pengembangan Industri dan Perdagangan Berbasis Pertanian	VIII – 6
8.2.8	Peningkatan Frekuensi dan Kualitas Promosi untuk Memperluas Pasar Sektor Pariwisata dan Produk-produk Unggulan Daerah	VIII – 7
8.2.9	Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	VIII – 7
8.2.10	Peningkatan Transparasi, Akuntabilitas dan Resposivitas Penyelenggaraan Pemerintahan	VIII – 8



BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX – 1
9.1	Indikator Kinerja Tujuan	IX – 1
9.2	Indikator Kinerja Sasaran	IX – 3
BAB X	PENUTUP	X – 1
10.1	Program Transisi	X – 1
10.2	Kaidah Pelaksanaan	X – 1

LAMPIRAN 1

Matrik Tujuan, Sasaran dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Visi, Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015

LAMPIRAN 2

Matrik Proyeksi Alokasi Belanja Langsung menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

LAMPIRAN 3

Matrik Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Urusan Pemerintah Daerah

LAMPIRAN 4

Matrik Proyeksi/Target SKPD selama Periode 2011-2015 sebagai Indikator Kinerja menurut Visi, Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015



DAFTAR TABEL

2.1	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Kediri	II – 1
2.2	Jenis Guna Lahan Kabupaten Kediri Tahun 2008	II – 3
2.3	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2010	II – 9
2.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Kediri	II – 10
2.5	Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2005 – 2009	II – 12
2.6	Perkembangan Angka Kompetensi Guru Tahun 2005 – 2009	II – 13
2.7	Jumlah Lulusan, Drop Out, dan Angka Transisi SD Tahun 2005 – 2009	II – 15
2.8	Jumlah Lulusan, Drop Out, dan Angka Transisi SMP Tahun 2005 – 2009 ..	II – 16
2.9	Perkembangan Sarana/Prasarana Kesehatan Tahun 2005 – 2009	II – 17
2.10	Tenaga pelayanan Kesehatan Tahun 2005 – 2009	II – 17
2.11	Perkembangan Kasus Penyakit Menular Tahun 2005-2009	II – 18
2.12	Persentase Penolong Persalinan (pada Balita) di Kab. Kediri	II – 19
2.13	Perkembangan Masalah Gizi Utama Tahun 2005 – 2009 (kasus)	II – 21
2.14	Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Publik	II – 23
2.15	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2005 – 2009	II – 24
2.16	Kontribusi Empat Sektor Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	II – 25
2.17	Tingkat Pengangguran Tahun 2005 – 2009	II – 27
2.18	Luas Panen dan Produksi Padi & Palawija Tahun 2005 – 2009	II – 28
2.19	Produktivitas Komoditas Padi Palawija Tahun 2005 – 2009	II – 29
2.20	Produksi Buah-buahan Tahun 2005 – 2009	II – 29
2.21	Produksi Sayur – sayuran Tahun 2005 – 2009	II – 30
2.22	Populasi Ternak Tahun 2005 – 2009	II – 31
2.23	Produksi Hasil Ternak Tahun 2005 – 2009	II – 31
2.24	Produksi Perikanan dan Jumlah Petani Ikan Tahun 2005 – 2009	II – 32
2.25	Perkembangan Koperasi Unit Desa dan non KUD Tahun 2005 – 2009	II – 34
2.26	Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2005 – 2009	II – 35
2.27	Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2005 – 2009	II – 36
2.28	Perkembangan Areal dan Produksi Hasil Hutan Tahun 2005 – 2009	II – 37
2.29	Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2005 – 2009	II – 38
2.30	Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Swasta Tahun 2005 – 2009	II – 39
2.31	Jumlah Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun 2005 – 2009	II – 40



2.32	Perkembangan Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	II - 40
2.33	Perkembangan Kondisi Jalan Tahun 2005 – 2009	II – 43
2.34	Luas Areal Tanah Sawah di Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2009	II – 44
2.35	Perkembangan Rambu dan APILL Tahun 2005 – 2008	II – 44
2.36	Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2009	II – 45
3.1	Perkembangan Target Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Neto Tahun 2005 – 2009	III – 1
3.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Neto Tahun 2005 – 2009	III – 2
3.3	Kontribusi APBD terhadap PDRB – ADHB TAHUN 2005 – 2009	III – 3
3.4	Perkembangan Pendapatan Tahun 2005 – 2009	III – 3
3.5	Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2005 – 2009	III – 5
3.6	Porsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Belanja Tidak Langsung	III – 6
3.7	Perkembangan Pembiayaan Tahun 2005 – 2009	III – 6
3.8	Proyeksi Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2011 – 2015	III – 8
3.9	Proyeksi Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2011 – 2015	III – 9
8.1	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama yang Dianut Masyarakat	VIII – 3
8.2	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Kesempatan Masyarakat untuk Memperoleh Pekerjaan	VIII – 3
8.3	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Ketersediaan dan Kemerataan Memperoleh Pelayanan Kesehatan, Pangan dan Perumahan Layak huni ...	VIII – 4
8.4	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Keikutsertaan Masyarakat dalam Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal	VIII – 4
8.5	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat untuk Menerapkan Pola Hidup Sehat	VIII – 5
8.6	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Suasana Aman, Tertib dan Damai di Masyarakat	VIII – 5
8.7	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Pengembangan Industri dan Perdagangan Berbasis Pertanian	VIII – 6
8.8	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Frekuensi dan Kualitas Promosi untuk Memperluas Pasar Sektor Pariwisata dan Produk – produk Unggulan Daerah	VIII – 7
8.9	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	VIII – 7



8.10	Proyeksi Alokasi Pendanaan Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas Penyelenggaraan Pemerintahan	VIII – 8
------	---	----------



DAFTAR GRAFIK

2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2010	II – 7
2.2	Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tahun 2005 – 2010	II – 8
2.3	Perkembangan Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Tahun 2005 – 2009	II – 11
2.4	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2005 – 2009	II – 14
2.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005 – 2009	II – 14
2.6	Angka Kematian Bayi Tahun 2005 – 2009	II – 19
2.7	Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2005 – 2009	II – 20



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 - 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011 - 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 - 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011 - 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Kediri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014.
- (2) RPJMD Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011 - 2015;
 - b. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011 - 2015.

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	:	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
BAB IV	:	Analisis Isu-isu Strategis
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	:	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	:	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pemerintah
BAB VIII	:	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	:	Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah
BAB X	:	Penutup

- (2) Materi beserta uraian secara rinci RPJMD Kabupaten Kediri ini dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan RPJMD Kabupaten Kediri dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 – 12 – 2010

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 7 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2011 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO